

Judul : Awas kosmetik berbahaya, BPOM disarankan rajib patroli siber
Tanggal : Minggu, 19 Juli 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Awas Kosmetik Berbahaya BPOM Disarankan Rajin Patroli Siber

ANGGOTA Komisi IX DPR Netty Prasetyani Aher menyoroti temuan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) atas 14 produk kosmetik berbahaya. Temuan itu harus jadi alarm serius semua pihak untuk meningkatkan literasi masyarakat sebagai konsumen demi menekan ancaman kesehatan.

Netty mengatakan, peredaran kosmetik berbahaya masih jadi ancaman nyata bagi kesehatan masyarakat secara luas. Karena itu, pengawasan tidak boleh berhenti pada penindakan hukum semata. Upaya itu harus dibarengi edukasi yang masif agar warga tidak mudah tergila-gila produk yang menjanjikan hasil instan.

Dia mengapresiasi langkah BPOM yang terus melakukan pengawasan dan penindakan tegas terhadap produk kosmetik bermasalah. Zat-zat berbahaya seperti merkuri, hidrokuinon, asam retinoat, hingga pewarna merah K10 sangat berisiko merusak kulit. "Bahan-bahan itu juga bahkan bisa memicu kanker," kata Netty di Jakarta, Jumat (17/7/2026).

Netty menjelaskan, 14 produk yang jadi temuan BPOM meliputi jenis krim malam, kutek, serta tabir surya. Jenis lainnya adalah serum tubuh, pelembab, pemutih, dan cairan penyegar kulit atau toner. Langkah tegas itu melindungi masyarakat dari risiko gangguan kesehatan akibat penggunaan kosmetik ilegal.

Dia menyebut, masyarakat kerap membeli produk kosmetik tanpa memastikan legalitas serta keamanan produk tersebut terlebih dulu. Keinginan memperoleh kulit pu-

tih atau wajah mulus secara cepat sering kali dimanfaatkan pelaku usaha nakal. Para pelaku memanfaatkan ketidaktahuan konsumen demi meraup keuntungan sepihak secara ilegal.

Karena itu, masyarakat harus sadar bahwa tidak ada hasil instan yang sebanding risiko kesehatan jangka panjang. Produk kosmetik yang mengandung merkuri, steroid, atau bahan berbahaya lain bisa menyebabkan kerusakan kulit permanen. "Penggunaan jangka panjang juga memicu gangguan organ yang lebih serius," terangnya.

Selanjutnya, kata Netty, BPOM didorong untuk terus memperkuat pengawasan terhadap penjualan kosmetik melalui platform digital dan medsos. Perkembangan perdagangan daring saat ini harus diimbangi sistem pengawasan yang semakin adaptif. Langkah antisipasi itu diperlukan karena banyak produk ilegal dipasarkan secara bebas melalui kanal tersebut.

Pengawasan ketat di marketplace dan medsos, kata dia, harus semakin diperkuat secara konsisten. Kolaborasi bersama platform digital bisa mempercepat penurunan produk yang tidak memiliki izin edar resmi. "Tindakan tegas itu wajib dilakukan sebelum produk kosmetik berbahaya menjangkau lebih banyak konsumen," ujarnya.

Menurutnya, perlindungan masyarakat dari bahaya kosmetik ilegal membutuhkan kerja sama solid dari semua pihak terkait. Pemerintah harus hadir melalui pengawasan kuat, sementara pelaku usaha wajib mematuhi regulasi. ■ PYB